

INFORMASI

Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial

- ▶ Peranan Etos Kerja Terhadap Transformasi Masyarakat Industrial Dalam Perspektif Historis. *oleh : Daliman*..... 1
- ▶ Aksesibilitas Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan, *oleh : Hastuti*..... 13
- ▶ Pengaruh Amerika Serikat di Negara-negara Kawasan Pasific Selatan, *oleh : Terry Irenewaty*..... 21
- ▶ Kiat Peningkatan Dayaguna dan Hasilguna Terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Melalui Optimalisasi Peran Serta Masyarakat, *oleh : Joko Christanto* 35 X
- ▶ Peningkatan Fungsi Pengawasan Pemerintahan di Indonesia, *oleh : Lena Sallita* 50
- ▶ Etika Lingkungan Sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat yang Berkelanjutan, *oleh : Muhsinatun Siasah Masruri*..... 63
- ▶ Pentingnya Komunikasi Efektif Bagi Para Pegawai Dalam Suatu Lembaga, *oleh : Ngadiran* 71 X
- ▶ Menolong Usaha Kecil Dengan Koperasi, *oleh : Nurhadi* 82
- ▶ Adaptasi Pesantren Terhadap Perkembangan IPTEK, *oleh : St. Nurbaya*.... 94 X
- ▶ Perilaku Manusia Dalam Organisasi, *oleh : Rosidah* 101
- ▶ Pola Kepemimpinan Penunjang Hubungan Perburuhan Pancasila, *oleh : Saliman*..... 110
- ▶ Undang-undang No.25 Tahun 1992 Prospek Perkembangan Koperasi Dalam PJPT-II, *oleh : Sukidjo*..... 122
- ▶ Posisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, *oleh : Suranto*..... 134
- ▶ Lembaga Pengadaan Tanah Dalam Tinjauan Hukum, *oleh : Sripito*..... 144
- ▶ Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Suatu Proyek Pembangunan, *oleh : Sugiharyanto* 157 ✓

MENOLONG USAHA KECIL DENGAN KOPERASI

Oleh :
Nurhadi

Abstrak

Pembangunan ekonomi yang kita lakukan menghendaki pemerataan partisipasi, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan "uluran tangan pemerintah" dengan menciptakan tatanan perekonomian dan iklim yang kondusif untuk menolong golongan ekonomi lemah.

Perhatian pemerintah pusat terhadap golongan ekonomi lemah sangat tinggi, antara lain diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai produk hukum, kebijakan-kebijakan dan perlindungan serta pengembangan koperasi sebagai wadah untuk bangkitnya golongan ekonomi lemah tersebut. Kebijakan pemerintah pusat tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah nyata di lapangan oleh instansi-instansi yang terkait secara koordinatif dan terpadu.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai dewasa ini koperasi belum bisa berperan sebagai pusat pelayanan perekonomian masyarakat. Kendalanya antara lain adalah kurangnya tenaga trampil dan profesional, lemahnya manajemen dan kurangnya modal. Dengan lahirnya UU No. 25 Tahun 1992, diharapkan koperasi bisa lebih dapat berkembang, sebab mengenai kemandirian dan pendidikan koperasi mendapat perhatian secara lebih intens.

Pendahuluan

Pada umumnya, penduduk di negara yang sedang berkembang hidupnya serba kekurangan dan dengan pendapatan yang pas-pasan. Andaikata ada "kelebihan" pendapatan hanya relatif kecil jumlahnya, sehingga investasinya juga rendah. Jika di negara yang sedang berkembang sudah terdapat perbandingan yang tinggi antara jumlah manusia dan jumlah faktor-faktor produksi yang lain, perkembangan penduduk yang cepat akan menimbulkan *diseconomics of scale* (Irawan dan M. Suparmoko, 1992: 47).

Dengan strategi pembangunan kita yang menitik beratkan pada bidang ekonomi, dan dibarengi dengan pembangunan di bidang kependudukan, ternyata pembangunan kita telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Namun demikian, kita masih menjumpai di sana sini ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Hal ini menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan ke arah kecemburuan sosial. Dengan demikian, usaha kecil dan menengah perlu mendapat "uluran tangan" agar bisa mandiri dalam kancah perekonomian